

KONFLIK SOSIAL DALAM NOVEL SI ANAK BADAI KARYA TERE LIYE (KAJIAN KONFLIK RALF DAHRENDORF)

Anisa Sindy Dwi Lestari

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
anisa.20002@mhs.unesa.ac.id

Suyatno

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
yatno.unesa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik sosial dalam novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf yang meliputi dua wajah masyarakat (konflik dan konsensus), kekuasaan dan wewenang, kelompok yang terlibat konflik, dan pengendalian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi sastra. Sumber data yang digunakan adalah novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye. Data yang disajikan berbentuk kalimat, alinea, maupun dialog yang memuat adanya konflik dan konsensus, kekuasaan dan wewenang, kelompok yang terlibat konflik, serta pengendalian konflik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu baca dan catat serta dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya (1) konflik dan konsensus, konflik yang ada berupa penindasan; pertentangan; penyuapan; keributan; kekerasan; serta manipulasi sedangkan konsensus berbentuk kesepakatan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mewujudkan integrasi, (2) kekuasaan dan wewenang, kekuasaan ditunjukkan melalui tindakan pejabat pemerintah kepada anak-anak; camat dengan utusan gubernur; pejabat pemerintah kepada masyarakat; utusan gubernur kepada pengawal; pejabat pemerintah kepada aparat petugas; pejabat pemerintah kepada Pak Kapten; pejabat pemerintah kepada Pak Mustar; Pak Alex dan utusan gubernur kepada Pak Kapten adapun wewenang dipegang oleh aparat petugas dan KPK, (3) kelompok yang terlibat konflik berupa kelompok semu (saksi serta demonstran) dan kelompok kepentingan (masyarakat, Pak Alex; Camat Tiong; dan Utusan Gubernur, serta wartawan), (4) pengendalian konflik berbentuk arbitrase.

Kata Kunci: konflik, konsensus, kekuasaan, wewenang, kelompok, pengendalian

Abstract

This research aims to describe social conflict in the novel Si Anak Badai by Tere Liye based on Ralf Dahrendorf's conflict theory which includes two faces of society (conflict and consensus), power and authority, groups involved in conflict, and conflict control. This research uses a descriptive qualitative method with a literary sociology approach. The data source used is the novel Si Anak Storm by Tere Liye. The data presented is in the form of sentences, paragraphs or dialogues that contain conflict and consensus, power and authority, groups involved in conflict, and conflict control. The data collection techniques used were reading and taking notes and analyzed using content analysis techniques. The results of this research show that there are (1) conflict and consensus, the conflict is in the form of oppression; contradiction; bribery; chaos; violence; as well as manipulation while consensus takes the form of agreement and consent which is needed to realize integration, (2) power and authority, power is demonstrated through the actions of government officials towards children; sub-district head with the governor's delegation; government officials to the public; the governor's messenger to the guards; government officials to officers; government officials to Mr. Captain; government officials to Pak Mustard; Mr. Alex and the governor's envoy to Mr. Captain, the authority is held by the officers and the Corruption Eradication Committee, (3) the groups involved in the conflict are pseudo-groups (witnesses and demonstrators) and interest groups (the community, Mr. Alex; the Tiong sub-district head; and the governor's envoy, as well as journalists), (4) conflict control in the form of arbitration.

Keywords: conflict, consensus, power, authority, group, control

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan oleh adanya konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata dapat muncul dalam sebuah karya sastra, salah satunya novel. Adanya kesamaan tersebut disebabkan karena novel pada dasarnya memang cerminan kehidupan manusia berdasarkan sudut pandang penulisnya (Alwi dalam Damayanti, 2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggambaran konflik di dalam sebuah karya sastra seperti novel, merupakan hasil pencitraan penulis mengenai kehidupan nyata yang dialami masyarakat, dengan harapan kondisi tersebut dapat dijadikan refleksi bagi para pembaca. Salah satu novel yang berisi konflik sosial serupa dengan persoalan nyata kehidupan adalah novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye. Novel tersebut menceritakan tentang konflik antara pemerintah dengan masyarakat pesisir terutama geng si anak badai yang berusaha mempertahankan kampungnya dari ancaman pembangunan pelabuhan. Konflik sosial tersebut disuguhkan secara apik melalui kehidupan anak-anak pesisir.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini tergolong penelitian sastra anak, sebab novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye termasuk kategori sastra anak karya orang dewasa. Sastra anak dibuat sebab melalui buku bacaan tersebut dapat dijadikan sarana, pandangan, hasrat, serta upaya untuk kematangan berpikir anak (Latifah, dkk., 2021). Hal serupa juga disampaikan oleh (Suyatno, 2009:75), bahwa sastra anak salah satunya seperti novel dibuat untuk mendukung perkembangan pengetahuan anak. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan, sastra anak merupakan sebuah karya yang dikemas dengan kebahasaan anak-anak dan berisi berbagai pengetahuan penting untuk diperkenalkan guna menunjang wawasan mereka mengenai realita kehidupan sosial. Seperti novel *Si Anak Badai* yang berisi konflik pembangunan pelabuhan yang menimpa anak-anak. Hal tersebut dapat menambah wawasan mengenai konflik sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan nyata kepada anak-anak sebagai pembaca.

Konflik sosial yang terkandung di dalam novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye ini, dikaji menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Pemikiran Dahrendorf mengenai teori konflik terbagi atas empat; pertama, dua wajah masyarakat (konflik dan konsensus). (Dahrendorf, 1986) memandang konflik sebagai tatanan sosial hasil

otoritas sekelompok orang yang berkuasa dan berpikir perubahan sosial berlangsung cepat. Dapat disimpulkan, bahwa konflik disebabkan oleh adanya pihak pemegang kontrol berkepentingan untuk melakukan perubahan, namun di sisi lain terdapat masyarakat yang merasa terguncang karena adanya perubahan tersebut. Kondisi demikianlah yang melahirkan ketegangan-ketegangan hingga berujung konflik. Selanjutnya mengenai konsensus, (Dahrendorf, 1986) menyebutkan bahwa tata masyarakat adalah hasil persetujuan bersama mengenai suatu nilai-nilai, atau dapat disebut hasil konsensus umum antar anggota masyarakat. Maka, dapat dikatakan bahwa konsensus adalah hasil kesepakatan masyarakat yang melahirkan norma serta ajaran moral kehidupan serta bersifat tetap.

Kedua, kekuasaan dan wewenang. (Weber dalam Dahrendorf, 1986), mengatakan jika kekuasaan merupakan tindakan seseorang yang melakukan keinginannya sendiri meskipun terdapat perlawanan dalam antarmubungan sosial. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan dalam kekuasaan seseorang yang berkedudukan tinggi antarmubungan sosial memiliki sebuah kekuatan tersendiri. Kelompok yang berkedudukan tinggi tersebut dapat melakukan tindakan atas kemauannya sendiri tanpa memikirkan pihak berkedudukan rendah. Kelompok tersebut berusaha mewujudkan keinginannya yang didapat dari pihak berkedudukan rendah. Selanjutnya, membahas tentang wewenang. (Dahrendorf, 1986) memaparkan wewenang adalah peluang seseorang tertentu untuk memerintah, sedangkan pihak lain harus bersedia mematuhi. Berdasarkan hal itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki wewenang berhak menyampaikan permintaan, perintah, peringatan, pelarangan kepada kelompok tertentu dengan harapan dapat mengontrol perilaku mereka. Jadi, wewenang merupakan peranan sosial seseorang yang memiliki hak secara sah untuk mengendalikan perilaku masyarakat sesuai sistem hukum yang berlaku.

Ketiga, kelompok yang terlibat konflik. Dahrendorf (dalam Ritzer, 2014) membagi kelompok yang terlibat konflik menjadi dua jenis, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. (Dahrendorf, 1986) memaparkan kelompok semu sebagai sekelompok orang dengan kepentingan dan perilaku yang sama, namun tidak mempunyai struktur yang dapat diketahui. Di sisi lain kelompok kepentingan dipaparkan sebagai kumpulan orang yang tersusun dan memiliki urgensi nyata

(Dahrendorf, 1986). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa kelompok semu bersifat sementara dalam jangka waktu yang singkat, sedangkan kelompok kepentingan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam kelompok semu tidak memiliki struktur; ikatan; dan kesadaran yang jelas, sedangkan kelompok kepentingan memiliki unsur, wujud organisasi, serta tujuan yang jelas dan bersifat nyata.

Keempat, pengendalian konflik. (Dahrendorf, 1986) menyampaikan jika terdapat tiga bentuk pengendalian konflik yang dipaparkan oleh Dahrendorf yaitu, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk menuntaskan permasalahan mereka secara damai. (Dahrendorf, 1986) berpendapat jika bentuk pengendalian konflik konsiliasi ini mengharuskan kedua belah pihak mengakui persoalan yang terjadi. Dalam hal ini pihak yang berselisih dibantu oleh konsiliator untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Konsiliator berperan serta dalam pemberian solusi atas persoalan yang sedang diperselisihkan. Adapun mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik oleh mediator sebagai penjematan pihak-pihak yang berselisih. Dalam hal ini mediator bersikap netral kepada pihak yang sedang berselisih. Lalu arbitrase yaitu bentuk pengendalian konflik dengan jalan mengadakan sebuah perjanjian yang bersifat final dan harus disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih. Dalam hal ini pihak yang membuat keputusan adalah arbitrator. Seperti yang dipaparkan oleh (Surbakti, 1992) arbitrase adalah proses penyelesaian masalah melalui arbitrator sebagai pihak yang memberikan keputusan akhir atas permasalahan yang terjadi. Persamaan antara ketiganya yaitu sama-sama bentuk penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, perbedaannya jika konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi, dalam hal ini pihak ketiga hanya bertugas menjembatani, sedangkan pada arbitrase pihak ketiga berperan dalam pengambilan keputusan.

Alasan penulis membahas konflik sosial dalam novel *Si Anak Badai*, karena konflik sosial yang dikemas melalui kehidupan anak-anak jarang dikupas. Adapun peneliti memilih judul demikian karena belum pernah dipakai oleh peneliti terdahulu. Di sisi lain juga mengadaptasi berbagai aspek dari penelitian sebelumnya, seperti objek penelitian, pokok bahasan, dan teori yang digunakan. Novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye dipilih sebagai objek

penelitian karena novel tersebut merupakan salah satu buku dari serial *Si Anak Nusantara* karya Tere Liye yang ramai diminati kalangan pembaca, setelah serial *Bumi* atau *Petualangan Dunia Paralel*. Di sisi lain, novel tersebut juga tergolong terbitan baru, yakni cetakan kedua yang diterbitkan oleh Sabakgrip tahun 2021, yang sejauh ini belum pernah dikaji menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Memilih topik konflik sosial dikarenakan hal tersebut menjadi permasalahan utama yang membangun novel *Si Anak Badai*. Sedangkan memilih teori konflik Ralf Dahrendorf untuk diterapkan dalam mengkaji novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye karena terdapat kesesuaian antara teori konflik yang disampaikan Dahrendorf dengan isi novel *Si Anak Badai*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif, karena terfokus mengenai konsep yang ditelaah yaitu konflik sosial, membaca sebuah karya sastra yaitu novel *Si Anak Badai*, menuangkan hasil melalui uraian deskripsi, dan menitik beratkan analisis makna di setiap datanya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra, karena dalam novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye terdapat banyak persoalan utamanya tentang konflik sosial yang masuk pendekatan sosiologi sastra.

Sumber data penelitian ini berupa novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye. Cetakan pertama novel ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Republika. Sedangkan cetakan keduanya diterbitkan pada tahun 2021 oleh Sabakgrip. Pada penelitian ini menggunakan cetakan kedua yang diterbitkan oleh Sabakgrip. Novel ini memiliki cover berwarna biru disertai tulisan *Si Anak Badai* dan ilustrasi jembatan kayu yang rusak di tengah laut, dengan tebal 335 halaman tanpa ada ilustrasi di dalamnya. Novel ini terdiri dari 25 sub judul, antara sub judul satu dengan lainnya berkesinambungan. Adapun data penelitian ini berupa kutipan kalimat, alinea, maupun dialog pada novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye, yang memuat adanya konflik dan konsensus, kekuasaan dan wewenang, kelompok yang terlibat konflik, serta pengendalian konflik.

Teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan yaitu, menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, sebab data penelitian didapatkan melalui sumber-sumber tertulis. Adapun langkah-langkah pemerolehan data menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan

oleh peneliti sebagai berikut: 1) membaca dan mengamati novel, 2) menentukan dan menandai data, dan 3) memberi kode. Selanjutnya teknik analisis datanya menggunakan analisis konten. Analisis konten dilakukan guna mengungkap, memahami, dan menangkap teori konflik Dahrendorf yang terkandung dalam novel *Si Anak Badai*. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut; 1) mencatat semua data yang ditemukan dalam novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye, 2) mengelompokkan data sesuai kategori dalam rumusan masalah, 3) memberikan kode pada data sesuai kategori masing-masing, 4) menganalisis data yang diperoleh, 5) embuat simpulan hasil analisis.

Uji keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan melalui cara peningkatan ketekunan dalam penelitian dan diskusi dengan teman sejawat. Melalui peningkatan ketekunan, peneliti akan mengamati data-data yang diperoleh secara jeli dan berulang-ulang. Pengecekan secara jeli dan berulang-ulang tersebut dilakukan guna memastikan data yang ditemukan sudah benar. Adapun uji kredibilitas melalui diskusi dengan teman sejawat. Cara ini dilakukan dengan menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada rekan sejawat dengan tujuan untuk mengetahui persepsi lain. Apabila terdapat kesamaan persepsi, hal itu dapat membantu peneliti menguatkan kebenaran hasil penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini disajikan konflik sosial menurut teori Ralf Dahrendorf meliputi dua wajah masyarakat (konflik dan konsensus), kekuasaan dan wewenang, kelompok yang terlibat konflik (kelompok semu dan kelompok kepentingan), dan pengendalian konflik (arbitrase).

1. Dua Wajah Masyarakat (Konflik dan Konsensus)

a. Konflik

Konflik adalah sebuah pertikaian yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok. Konflik yang dikemukakan Dahrendorf mengakar pada penggunaan kekuasaan. Pihak mendominasi (berkuasa) berkepentingan untuk melakukan perubahan, sedangkan pihak didominasi (dikuasai) berusaha menentang perubahan tersebut. Perbedaan antara keduanya tersebut melahirkan ketegangan-ketegangan yang berujung konflik. Pada novel *Si*

Anak Badai karya Tere Liye, konflik berbentuk penindasan; pertentangan; pemalsuan; penyuapan; perusakan; kericuhan; dan kekerasan. Beberapa bentuk dari konflik tersebut akan dipaparkan sebagai berikut;

Konflik penindasan ditunjukkan melalui data yang memuat adanya penderitaan tak berkesudahan yang dirasakan masyarakat Manowa. Penderitaan tersebut muncul akibat adanya kepentingan pejabat pemerintah untuk mendirikan pelabuhan di Kampung Manowa. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, pejabat pemerintah tidak memperdulikan nasib masyarakat Manowa. Urgensi mereka hanyalah memastikan pembangunan pelabuhan berhasil dilaksanakan. Oleh karena hak-hak masyarakat Manowa yang tidak diperhatikan tergolong sebagai bentuk penindasan. Adapun data yang menunjukkan penindasan tersebut, sebagai berikut;

Data (1)

Kalau bangunan sekolah kami di robohkan, rumah-rumah kami tinggal menunggu waktu saja. Kesusahan atas kampung kami akan bertambah-tambah. Setelah pasar terapung yang tidak ada lagi beberapa minggu ini, nelayan susah menjual ikan tangkapan mereka, juga tentang Pak Kapten yang tidak lama lagi divonis pengadilan (SAB, 2021: 293). KK/KONF/1

Data di atas, menunjukkan konflik berbentuk penindasan yang dilakukan pejabat pemerintah kepada masyarakat. Penindasan tersebut dibuktikan melalui adanya penderitaan yang dirasakan masyarakat Manowa akibat proyek pembangunan pelabuhan. Adapun contoh penderitaan tersebut, saat masyarakat merasa kesulitan menjual ikan hasil tangkapan mereka karena pasar terapung tidak lagi beroperasi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat Manowa kehilangan sumber ekonomi sehari-hari. Tidak hanya itu, masyarakat juga dicemaskan dengan informasi bahwa sekolah sekaligus rumah-rumah akan dirobohkan. Mereka semakin merasa menderita karena tempat tinggalnya terancam digusur untuk dijadikan pelabuhan.

Dapat disimpulkan, dari data (1) konflik berupa penindasan dilakukan pejabat pemerintah karena adanya kepentingan yang ingin dicapai. Sebagai pihak yang mendominasi (berkuasa), pejabat pemerintah dapat bertindak semena-mena untuk mewujudkan kepentingannya. Di sisi lain, sebagai pihak didominasi, pertentangan yang dilakukan masyarakat Manowa tidak membuahkan

hasil, justru mereka semakin tertindas. Dari kepentingan tersebut kesejahteraan masyarakat Manowa semakin direnggut. Mereka merasa kesulitan dan semakin tertekan akan dampak yang ditimbulkan dari perencanaan pembangunan pelabuhan. Namun, sebagai pihak didominasi masyarakat tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pertentangan yang lebih besar.

Selanjutnya, terdapat data yang mengandung konflik berbentuk perusakan. Terjadinya konflik juga sering diiringi dengan adanya perusakan. Perusakan timbul sebagai dampak konflik yang tidak berkesudahan. Seperti dalam konflik pembangunan pelabuhan ini. Adanya kepentingan tanpa proses kesepakatan terlebih dahulu, menimbulkan konflik yang tak berkesudahan. Konflik tersebut berujung pada perusakan sekolah anak-anak. Kesepakatan yang tidak diadakan sebelumnya tentu menuai pertentangan dari salah satu pihak yang berkonflik. Adapun bentuk data perusakan, sebagai berikut;

Data (2)

Keadaan tambah bising dengan hardikan para tukang pukul. Juga oleh ucapan-ucapan warga yang menentang dirobokkannya sekolah serta tangis Mutia dan kawan-kawannya (SAB, 2021: 302). KK/KONF/2

Berdasarkan data (2) di atas, menunjukkan konflik perusakan sekolah yang dirasakan anak-anak. Hal itu dibuktikan melalui alenia data (12). Hari itu pejabat pemerintah sudah bertekad bulat untuk menghancurkan sekolah tempat menuntut ilmu anak-anak di Kampung Manowa. Kejadian tersebut tentu saja ditentang masyarakat setempat bahkan anak-anak. Anak-anak sangat merasa sedih, kecewa, dan marah. Adu mulut antara warga dengan para penjaga pun tidak dapat terhindarkan. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan proses perobohan sekolah. Perintah tersebut berasal dari pejabat pemerintah, sehingga tidak ada yang sanggup menentang.

Dapat disimpulkan, dari data (2) konflik berupa perusakan dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan pihak mendominasi. Di sini nasib dari pihak didominasi tidak diperdulikan, termasuk anak-anak. Pihak mendominasi merasa berkuasa sehingga dapat mengambil tindakan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan perlawanan dari pihak didominasi. Pihak didominasi yang merasa menderita akibat adanya kepentingan yang terus

dipaksakan. Melahirkan perlawanan-perlawanan demikian. Hal itu sebagai wujud usaha untuk melindungi hak-hak mereka.

b. Konsensus

Konsensus adalah sebuah kesepakatan bersama yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan Dahrendorf, tata masyarakat tercipta melalui hasil konsensus umum. Konsensus bersifat statis dan dapat menghasilkan persamaan nilai atau norma kehidupan yang penting bagi keberlanjutan masyarakat. Adanya persamaan tersebut melahirkan terbentuknya kerjasama yang mendorong proses integrasi. Integrasi sendiri penting untuk dicapai guna menyelaraskan unsur-unsur di dalam masyarakat. Konsensus di sini dinyatakan secara tersirat. Konsensus tersirat tersebut dapat dilihat melalui adanya keputusan membebaskan Unan sebagai terduga pencuri tas Kak Ros, usaha Pak Kapten mengumpulkan masyarakat untuk menyamakan suara, dan adanya pembagian tugas dalam kegiatan gotong royong membangun jembatan. Berikut sebagian buktinya;

Konsensus yang berupa kesepakatan dapat dianggap sebagai proses penyelesaian konflik. Pihak-pihak yang berselisih dapat melakukan pemufakatan bersama untuk menemukan titik temu atas perselisihan yang terjadi. Keputusan yang mereka ambil bersama tersebut menghentikan timbulnya konflik. Seperti halnya kesepakatan dalam menyelesaikan konflik pencurian tas Kak Ros. Pihak-pihak berselisih yang ditengahi oleh Wak Sidik melakukan perundingan. Perundingan itu bertujuan untuk menghasilkan titik terang yang dapat mengakhiri perselisihan tersebut. Adapun bukti data konsensus, sebagai berikut;

Data (3)

Di rumah Wak Sidik, Bang Kopli yang melapor. Wak Sidik memerintahkan pemuda yang dituduh maling didudukkan di ruang depan. Kak Ros dan kami bertiga diminta masuk juga. Malim yang tidak disebut namanya, percaya diri ikut masuk. Sementara anak-anak lain menonton dari teras.... Lima belas menit kemudian urusan itu selesai. Kak Ros dan kami semua minta maaf kepada Unan (SAB, 2021: 184-187). KK/KSS/3

Data (3), terdapat konsensus yang terjadi dalam mengatasi persoalan hilangnya tas Kak Ros. Kak Ros kehilangan tasnya saat belanja di pasar terapung. Seseorang yang diduga pencuri pun

berhasil ditangkap oleh Bang Kopli, Zaenal, Awang, Malim, dan Ode. Setelah tertangkap Bang Kopli memutuskan untuk membawa maling tersebut kepada Wak Sidik selaku kepala kampung. Setibanya di rumah Wak Sidik maling tersebut diinterogasi, Awang sebagai penangkap juga dimintai keterangan. Pembicaraan tersebut dilakukan demi memperoleh keterangan sebenar-benarnya, sebelum memutuskan hukuman yang tepat bagi pelaku jika terbukti bersalah. Ditengah proses pembicaraan seorang ibu datang membawa tas Kak Ros yang ternyata ketinggalan di perahunya. Akhirnya Wak Sidik dan mereka semua bersepakat bahwa kejadian tersebut hanya salah paham semata. Semua bersepakat untuk membebaskan Unan yang sempat diduga menjadi seorang pencuri.

Dapat disimpulkan, dari data (3) secara tidak langsung Wak Sidik dan pihak-pihak yang berselisih berusaha menemukan titik terang permasalahan hilangnya tas Kak Ros. Hal itu dibuktikan melalui tindakan Wak Sidik yang melakukan interogasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang berselisih. Di sini pihak-pihak tersebut menyampaikan informasi sesuai sudut pandang masing-masing. Interogasi yang dilakukan Wak sidik bertujuan untuk mengetahui kronologi hilangnya tas Kak Ros. Ternyata kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman ketika seorang ibu-ibu datang membawa tas yang ketinggalan diperahunya. Mereka pun bersepakat membebaskan Unan yang terbukti tidak bersalah. Keputusan untuk membebaskan Unan tersebut sebagai bukti adanya konsensus.

Selain itu, adanya konsensus secara tersirat juga dibuktikan melalui pembagian tugas dalam pembangunan jembatan. Tindakan melakukan pembagian tugas membuktikan adanya kesepakatan bersama di dalamnya. Kesepakatan bersama dilakukan bertujuan agar pembagian tugas pembangunan jembatan terurai secara adil. Seluruh lapisan masyarakat memperoleh tugas yang sama rata. Keadilan tersebut dapat menyebabkan gotong royong berlangsung secara tentram. Adapun data yang menunjukkan konsensus dalam pembagian tugas pembangunan jembatan, sebagai berikut;

Data (4)

Semua warga ikut gotong royong. Pembagian tugas dilakukan. bapak-bapak dan para pemuda mengerjakan jembatan. Mereka akan mendirikan tiang, memasang kayu palang, terakhir memaku bilah bambu.

Ibu-ibu dan anak gadis sudah bekerja tadi malam. Mereka bertugas menyiapkan konsumsi. (SAB, 2021: 188). KK/KSS/4

Berdasarkan data di atas, konsensus dibuktikan melalui proses pembagian tugas pembangunan jembatan. Pembagian tugas dilakukan oleh seluruh warga yang ikut gotong royong. Masing-masing warga diberikan tugas tertentu. Bapak-bapak dan para pemuda bertugas mendirikan tiang, memasang kayu plang, dan memaku bilah bambu. Sedangkan, ibu-ibu dan anak gadis bertugas menyiapkan konsumsi. Pembagian tugas tersebut menyiratkan adanya bentuk kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi secara tidak sadar dapat dilihat melalui proses pembagian tugas yang tentunya membutuhkan persetujuan dari seluruh warga yang mengikuti gotong royong. Hal tersebut dilakukan agar pembagian tugas dilakukan secara seadil-adilnya, sehingga pekerjaan pembangunan jembatan terasa lebih ringan.

Dapat disimpulkan, dari data (4) membuktikan bahwa konsensus mendorong terbentuknya integrasi. Hal itu dibuktikan melalui proses gotong royong pembangunan jembatan yang berjalan tentram. Ketentraman kegiatan tersebut disebabkan oleh adanya kesepakatan secara tidak sadar yang dilakukan dalam pembagian tugas pembangunan jembatan. Pemagian tugas yang sama-rata membentuk keharmonisan selama proses pembangunan jembatan, karena tidak ada warga yang merasa diberatkan.

2. Kekuasaan dan Wewenang

a. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau individu untuk mengatur dan menguasai pihak lain berdasarkan power yang mereka miliki. Dalam hal ini Dahrendorf berpandangan jika kekuasaan berkaitan dengan kontrol yang diberikan oleh pihak yang berkuasa agar memperoleh keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Berdasarkan hal itu, adanya kekuasaan di sini ditunjukkan secara tersirat dan tersurat. Kekuasaan tersurat dibuktikan melalui kontrol pejabat pemerintah kepada anak-anak, tindakan semena-mena pemerintah kepada masyarakat, perintah Utusan Gubernur kepada pengawalnya, kontrol pejabat pemerintah kepada Pak Mustar, dan tindakan Pak Alex terhadap Pak Kapten. Adapun bentuk kekuasaan secara tersurat ditunjukkan melalui Camat Tiong yang merasa kekuasaannya berada di bawah Utusan Gubernur,

kekuasaan pejabat pemerintah sehingga dapat menginstruksikan petugas untuk menangkap dan merekayasa kasus Pak Kapten, bapak yang merasa jika kekuasaan pemerintah tidak sebanding dengan posisi dirinya, dan ucapan Utusan Gubernur yang menyatakan jika berkuasa. Berikut beberapa buktinya;

Kekuasaan ditunjukkan melalui jabatan yang tinggi. Pada dasarnya relasi antara jabatan dengan kekuasaan sering kali tidak terpisahkan. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi melahirkan sebuah kekuasaan. Namun, tidak semua kekuasaan yang dilahirkan pihak berkuasa sesuai dengan keinginan pihak yang dikuasa. Kadang kala terdapat pihak yang berusaha menentang kekuasaan karena tidak sejalan dengan pemikiran mereka, tetapi karena perbedaan jabatan antara mereka penentangan tidak dapat dilakukan. Adapun bukti kondisi tersebut ditunjukkan pada data berikut ini;

Data (5)

“Kau seorang camat, mengapa kau tidak punya kuasa? Kau bilang sana ke kota provinsi, penduduk kampung Manowa tidak membutuhkan pelabuhan besar.

Camat Tiong menggeleng. “Jarak jabatan kami bagaikan bumi dan langit, Wak. Saya hanya camat, sementara Utusan Gubernur pejabat dari provinsi, tingkatnya di bawah gubernur.”

“Oi, kata siapa? Kau sebenarnya juga punya kekuatan untuk membatalkannya. Kau tahu kisah tentang tukang cuci piring di sebuah kapal yang membuat nahkoda akhirnya membatalkan keputusannya.” (SAB, 2021: 149). KW/KKSN/5

Berdasarkan data di atas, terdapat perbedaan kekuasaan antara Utusan Gubernur dengan Camat. Hal itu dibuktikan melalui dialog Pak Kapten yang bertanya “Kau seorang camat, mengapa kau tidak punya kuasa?” dan Camat Tiong yang mengatakan “Jarak jabatan kami bagaikan bumi dan langit, Wak”. Pada awalnya Pak Kapten menganggap Tiong sebagai camat memiliki kekuasaan untuk membatalkan proyek pembangunan pelabuhan. Namun, Camat Tiong tidak dapat melakukan hal itu. Meskipun sama-sama pegawai pemerintah, jabatan Camat Tiong berada jauh di bawah Utusan Gubernur. Kekuasaan yang dimiliki Camat Tiong tidak sebanding jika digunakan untuk menentang Utusan Gubernur.

Dapat disimpulkan, dari data (5) kekuasaan terlahir salah satunya dari tinggi rendahnya jabatan seseorang. Tingginya jabatan tersebut meletakkan seseorang pada kedudukan atas. Seseorang yang berada pada kedudukan atas akan memiliki kekuatan besar untuk mengatur dan menguasai pihak lain sesuai kehendaknya. Meskipun terdapat pihak yang menentang, mereka hanya berkemungkinan kecil untuk berhasil mengubah kondisi. Hal tersebut disebabkan oleh kedudukan mereka berada dibawah pihak yang berkuasa, sehingga suara yang disampaikan berpeluang kecil untuk didengar.

Adapun bukti lain yang menunjukkan jika kekuasaan bersumber pada jabatan yang tinggi. Pada dasarnya relasi antara jabatan dengan kekuasaan sering kali tidak terpisahkan. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi melahirkan kekuasaan yang besar. Hal tersebut dibuktikan melalui Bapak yang merasa tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk menentang kepentingan pejabat pemerintah. Bapak sadar jika kekuasaan pejabat pemerintah tidak sebanding dengan dirinya sebagai pegawai kecamatan. Adapun bukti datanya sebagai berikut;

Data (6)

Bapak menghembuskan napas perlahan. Dia dalam posisi yang rumit sekali. Sebagai pegawai kecamatan. Bapak tahu beberapa hal, tapi tidak bisa melakukan apapun. Kekuatan Bapak tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan pejabat di sana (SAB, 2021: 277). KW/KKSN/6

Data (6) di atas, terdapat kekuasaan antara pejabat pemerintah dengan Bapak selaku pegawai kecamatan. Hal tersebut dibuktikan melalui dialog bapak yang menyatakan “Kekuatan Bapak tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan pejabat di sana”. Di sini Bapak sebagai pegawai kecamatan memiliki kedudukan di bawah pejabat pemerintah. Oleh karena itu, Bapak sebagai “bawahan” merasa tidak memiliki kekuatan untuk menentang pejabat pemerintah. Dirinya sadar bahwa perbedaan kekuasaan mereka tidak sebanding. Berterima atau tidaknya Bapak terhadap rencana pejabat pemerintah, harus tetap mengikuti prosedur yang diberikan pihak terkait.

Dapat disimpulkan, dari data (6) kembali ditunjukkan kekuasaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jabatan seseorang dalam kehidupan sosial. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi lebih berkuasa, sedangkan yang dibawahnya sebagai

pihak yang dikuasai. Seseorang yang berkuasa memiliki kekuatan besar yang berat untuk ditentang pihak lain. Seperti hal nya yang dialami Bapak. Bapak yang memiliki kedudukan di bawah pejabat pemerintah tidak dapat menentang kepentingan mereka dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan. Dirinya terpaksa harus bungkam dan bersedia mengikuti kemauan pihak yang berkuasa, karena memiliki kekuatan yang tidak sebanding.

b. Wewenang

Wewenang adalah hak seseorang untuk memilih tindakan atau mengambil sikap guna dapat mengatur pihak lain. Pihak berwenang akan mengatur pihak lain sesuai dengan kaidah-kaidah formal yang berlaku. Sepakat dengan hal itu, Dahrendorf mengemukakan jika wewenang ini berkaitan dengan bentuk kekuasaan yang sah. Wewenang menjadi salah satu fungsi hukum yang mendukung pelaksanaan kewenangan secara resmi. Dalam hal ini pihak yang diatur harus bersedia mengikuti perintah pihak berwenang. Dalam novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye, bentuk wewenang digambarkan secara tersirat melalui aparat petugas dan KPK.

Sebagai penegak hukum, aparat petugas memiliki wewenang salah satunya yaitu melakukan penangkapan terhadap terduga tindak pidana. Penangkapan yang dilakukan oleh aparat petugas harus sesuai kaidah-kaidah formal yang berlaku. Di sisi lain terduga harus bersedia mengikuti arahan pihak yang berwenang. Hal tersebut bertujuan untuk mengungkap dan mengetahui tersangka yang melakukan tindak pidana. Bentuk wewenang tersebut dibuktikan melalui data berikut;

Data (7)

“Bapak dituduh terlibat dalam meledaknya kapal Maju Sejahtera. Kami membawa surat penangkapan resmi. Kami minta kerjasamanya.” Petugas itu berkata tegas.

Bersalah atau tidak, pengadilan yang akan memutuskan. Mau sepuluh tahun yang lalu, mau dua puluh tahun yang lalu, sepanjang ada buktinya, tetap bisa diproses. Kami hanya menjalankan prosedur hukum. Tolong jangan melawan petugas” (SAB, 2021: 229-230). KW/WWNG/7

Berdasarkan data (7), wewenang dipegang oleh aparat petugas. Hal itu dibuktikan melalui dialog “Kami membawa surat penangkapan resmi.... Kami hanya menjalankan prosedur hukum”. Petugas melakukan penangkapan terhadap Pak Kapten,

berdasarkan dugaan kasus meledaknya kapal Maju Sejahtera. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan surat resmi yang dibawa petugas, sehingga Pak Kapten harus bersedia mengikuti instruksi petugas dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk memperoleh titik terang atas permasalahan yang terjadi. Petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus yang menimpa Pak Kapten. Kemudian diserahkan kepada pihak pengadilan untuk diputuskan.

Dapat disimpulkan, dari data (7) wewenang yang dipegang oleh petugas berkaitan dengan peranan sosial mereka sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum petugas memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan kepada terduga yang terlibat kasus tindak pidana. Wewenang tersebut harus didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku. Seperti halnya yang dilakukan pada Pak Kapten. Dirinya sebagai terduga yang melakukan pembakaran kapal Maju Sejahtera harus ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan melalui surat penangkapan resmi sebagai bentuk prosedur hukum yang sah.

Adapun bentuk wewenang lain melalui adanya KPK. Di sini KPK juga tergolong dalam lembaga penegak hukum. Sebagai penegak hukum mereka bertugas untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana atau korupsi. Apabila terdapat dugaan penyelewengan dana, maka mereka berhak untuk menyelidiki, menyadap, menggeledah, memeriksa, serta mengumpulkan bukti agar dapat mengungkap kasus tersebut. Tindakan tersebut sebagai bentuk wewenang yang dimiliki KPK. Adapun bukti bahwa KPK memiliki wewenang dalam data berikut;

Data (8)

KPK menggeledah kantor Utusan Gubernur. Daftar pejabat diduga penerima suap ditemukan di kantor Utusan Gubernur. Terindikasi korupsi: pembangunan pelabuhan di Manowa dibatalkan (SAB, 2021: 332). KW/WWNG/8

Berdasarkan data di atas, terdapat kewenangan yang dipegang oleh KPK. Hal tersebut dibuktikan melalui kalimat “KPK menggeledah kantor utusan gubernur”. Tindakan KPK melakukan penggeledahan kantor Utusan Gubernur sebagai bukti wewenang yang mereka miliki. Penggeledahan tersebut dilakukan agar KPK memperoleh bukti adanya penyelewengan dana dari proyek pembangunan pelabuhan di Kampung

Manowa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bukti penggeledahan yang didapat berupa ditemukannya daftar pejabat yang diduga menerima suap di kantor Utusan Gubernur. Proyek pembangunan pelabuhan tersebut terbukti sebagai tindak korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah. Akhirnya KPK memutuskan untuk membatalkan rencana pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa dan menangkap para pejabat yang terlibat kasus terkait.

Dapat disimpulkan, dari data (8) wewenang dipegang oleh KPK. Wewenang tersebut berkaitan dengan peranan sosial mereka sebagai penegak hukum yang memberantas korupsi. Sebagai pihak yang berwenang memberantas korupsi, KPK berhak untuk melakukan penyelidikan mengenai adanya dugaan kasus penyelewengan dana. Apabila terbukti terdapat penyelewengan dana, maka mereka berhak untuk menuntut pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan dana tersebut. Seperti yang dilakukan pada pejabat pemerintah.

3. Kelompok yang Terlibat Konflik

a. Kelompok Semu

Kelompok yang terlibat konflik atau disebut kelompok bertentangan pada dasarnya muncul akibat adanya perbedaan kepentingan. Dahrendorf sendiri membagi kelompok ini menjadi dua kategori, yang pertama kelompok semu. Kelompok semu terbentuk akibat adanya kepentingan yang sama secara tersembunyi. Namun, mereka tidak memiliki struktur yang dapat dikenali.

Adanya kelompok semu di sini berupa demonstran. Demonstran tersebut melakukan protes atas kejadian penangkapan Pak Kapten. Demonstran tergolong dalam kelompok semu sebab mereka terbentuk akibat adanya kepentingan yang sama namun tersembunyi. Mereka berkepentingan untuk melakukan usaha membebaskan Pak Kapten. Selain itu, demonstran hanya bersifat sementara tanpa memiliki struktur organisasi yang jelas juga menjadi faktor mereka tergolong dalam kelompok semu. Adapun bukti datanya sebagai berikut;

Data (9)

Pak Alex menatap kerumunan “demonstran” (SAB, 2021: 265). KTK/KLSM/29

Berdasarkan data (9), terdapat kelompok semu berupa demonstran. Demonstran tersebut berkumpul untuk melakukan perlawanan terhadap pejabat pemerintah yang telah menjerat Pak Kapten. Demonstran itu sendiri berisi anak-anak Kampung

Manowa. Mereka mengetahui jika Pak Kapten tidak bersalah, dirinya hanya dituduh terlibat dalam kasus meledaknya kapal Maju Sejahtera. Oleh karena itu, anak-anak merasa tidak terima dan melakukan demo kepada Pak Alex selaku salah satu pihak bagian dari pejabat pemerintah.

Dapat disimpulkan, dari data (9) kelompok semu berupa demonstran. Mereka masuk dalam kategori kelompok semu sebab memiliki tujuan yang sama secara tersembunyi, yakni untuk membebaskan Pak Kapten. Mereka berkerumun dalam melaksanakan aksi protes atas penangkapan Pak Kapten. Kerumunan tersebut bersifat sementara. Para demonstran membentuk kerumunan secara spontan yang tidak terduga. Hal itu sesuai dengan ciri kelompok semu.

Selain itu, terdapat kelompok semu berupa saksi-saksi palsu yang dibentuk pejabat pemerintah. Saksi-saksi tersebut tergolong dalam kelompok semu karena terbentuk secara spontan dalam situasi tertentu. Mereka bersifat sementara, hanya untuk memberikan kesaksian mengenai meledaknya kapal Maju Sejahtera. Mereka juga tidak memiliki ikatan, aturan, dan kesadaran yang jelas sebab tidak saling mengenal. Adapun bukti datanya sebagai berikut;

Data (10)

“Sehebat apa pun Kak Buyung membela Pak Kapten, tanpa bukti yang cukup, dia tidak bisa melawan rekayasa kasus itu. Apalagi saksi dari pihak mereka banyak sekali. Dan Kak Buyung tentu tidak bisa membayar orang untuk pura-pura jadi saksi seperti yang mereka lakukan” (SAB, 2021: 318). KTK/KLSM/10

Berdasarkan data (10), terdapat kelompok semu yang beranggotakan saksi-saksi dari pejabat pemerintah. Hal tersebut disampaikan secara tersirat melalui dialog Zaenal “Apalagi saksi dari pihak mereka banyak sekali. Dan Kak Buyung tentu tidak bisa membayar orang untuk pura-pura jadi saksi seperti yang mereka lakukan”. Berdasarkan hal itu, secara tidak langsung dapat diketahui jika pejabat pemerintah secara tersembunyi mengumpulkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan palsu atas kasus meledaknya kapal Maju Sejahtera. Saksi-saksi tersebut dibentuk sebagai usaha untuk memberatkan hukuman Pak Kapten.

Dapat disimpulkan, dari data (10) kelompok semu berupa saksi-saksi. Hal tersebut dikarenakan proses pembentukan saksi secara rahasia dan sembunyi-sembunyi masuk dalam kategori kelompok semu. Saksi-saksi yang telah

dikumpulkan memiliki kepentingan yang sama namun mereka tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga dapat diketahui tidak adanya struktur dan anggota yang jelas dalam perkumpulan saksi-saksi tersebut. Mereka berkumpul bukan karena kepentingan diri sendiri, namun adanya organisir dari pihak lain agar kepentingannya dapat terwujud.

b. Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan kategori lainnya dalam kelompok bertentangan. Kelompok kepentingan ini kebalikannya dari kelompok semu. Jika di dalam kelompok semu tidak memiliki ikatan, aturan, dan kesadaran yang jelas. Sebaliknya, dalam kelompok kepentingan ini memiliki struktur yang lebih jelas di dalamnya. Dahrendorf memaparkan jika kelompok kepentingan memiliki struktur, bentuk organisasi, tujuan, dan anggota yang jelas.

Bukti adanya kelompok kepentingan ditunjukkan melalui perkumpulan masyarakat Manowa di dermaga. Mereka masuk dalam kategori kelompok kepentingan karena memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut yaitu bekerjasama untuk menentang proyek pembangunan pelabuhan oleh pejabat pemerintah. Selain itu, sebagai anggota masyarakat yang memiliki struktur serta anggota yang jelas, dapat dilihat, dan dikenali, sesuai dengan ciri kelompok kepentingan. Adapun bukti datanya sebagai berikut;

Data (11)

“Itulah kenapa kita kenapa kita semua berkumpul malam ini di dermaga. Aku secara khusus meminta petugas layar tancap memutar sebuah film penting untuk kita semua. Agar kita satu suara. Agar kita bersatu menghadapi masalah pelik ini. Kita tidak bisa melawan mereka sembarangan, mereka punya kuasa dan uang” (Liye, 2021: 224). KTK/KLKP/11

Merujuk data di atas, terdapat kelompok kepentingan yang beranggotakan masyarakat Kampung Manowa. Pada malam itu mereka berkumpul di dermaga untuk menyaksikan film tentang pembangunan pelabuhan di sebuah kampung. Film itu berisikan kondisi masyarakat yang sangat menderita dengan adanya pembangunan pelabuhan. Masyarakat Kampung Manowa yang takut jika kejadian serupa menimpa mereka, melakukan antisipasi dengan cara menyamakan suara antara mereka. Masyarakat bekerjasama untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan pejabat pemerintah. Hal itu dilakukan demi

terselamatkannya Kampung Manowa dari gusuran pembangunan pelabuhan.

Dapat disimpulkan, dari data (11) yang tergolong dalam kelompok kepentingan adalah masyarakat Kampung Manowa. Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki kepentingan secara jelas untuk mempertahankan Kampung Manowa. Kepentingan tersebut ditunjukkan melalui perkumpulan yang diadakan secara terang-terangan di dermaga. Selain itu, sebagai masyarakat yang hidup berdamping sejak lama tentu saja mereka memiliki struktur dan bentuk organisasi yang jelas. Hal tersebut dibuktikan melalui adanya Pak Kapten sebagai tetua kampung dan Wak Sidik sebagai kepala kampung. Selain itu, mereka yang beranggotakan masyarakat itu sendiri sebagai bukti jika wujud kelompok ini dapat dikenali, dilihat, dan jelas siapa anggotanya.

Adapun kelompok kepentingan lain yang ditunjukkan melalui perkumpulan Pak Alex, Camat Tiong, dan Utusan Gubernur. Mereka tergolong kelompok kepentingan sebab memiliki tujuan yang jelas. Tujuan mereka yaitu untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa. Selain itu, sebagai pegawai pemerintah, mereka memiliki struktur yang jelas, dapat dilihat, dan dikenali. Hal itu dibuktikan melalui jabatan yang mereka miliki masing-masing. Adapun bukti datanya sebagai berikut;

Data (12)

Ada beberapa orang di dalamnya. Aku mengenali tiga di antaranya---Pak Alex, Camat Tiong, dan Utusan Gubernur. Tiga yang lain aku tidak tahu. Mereka sepertinya percaya diri sekali tidak akan ada yang berhasil menyelipkan melewati tukang pukul yang berjaga

“Pelabuhan itu pasti jadi, Pak Alex. Aku akan memastikan semua berjalan lancar.” Suara Camat Tiong terdengar mantap. “Sekolah sudah berhasil kita robohkan, hanya soal waktu rumah-rumah penduduk menyusul”. (SAB, 2021: 322-323).KTK/KLKP/12

Berdasarkan data di atas, terdapat kelompok kepentingan yang beranggotakan Pak Alex, Camat Tiong, dan Utusan Gubernur. Hal tersebut dibuktikan melalui kalimat “Ada beberapa orang di dalamnya. Aku mengenali tiga di antaranya---Pak Alex, Camat Tiong, dan Utusan Gubernur” dan dialog Camat Tiong yang mengatakan “Pelabuhan itu pasti jadi, Pak Alex. Aku akan memastikan semua berjalan lancar”. Berdasarkan kedua hal

tersebut, menggambarkan jika Pak Alex, Camat Tiong, dan Utusan Gubernur memiliki kepentingan yang sama dalam hal mewujudkan rencana pembangunan pelabuhan. Dalam mencapai kepentingannya mereka berkumpul untuk saling kerja sama. Mereka berdiskusi di dalam kabin kapal, membahas kepentingan-kepentingan tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki struktur yang jelas melalui jabatan yang dimiliki.

Dapat disimpulkan, dari data (12) kelompok kepentingan beranggotakan Pak Alex, Camat Tiong, dan Utusan Gubernur. Mereka termasuk dalam kelompok ini sebab memiliki kepentingan yang sama, anggota, dan struktur yang jelas. Kepentingan yang sama tersebut berwujud keinginan untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan di Kampung Manowa. Anggota dari kelompok kepentingan ini juga jelas yang terdiri dari Pak Alex, Camat Tiong, dan Utusan Gubernur. Adapun bentuk struktur mereka sebagai pegawai pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah mereka memiliki struktur organisasi yang jelas dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Utusan gubernur menduduki urutan paling atas, lalu dibawahnya terdapat pegawai-pegawai lain, hingga mengarah ke camat. Pada umumnya struktur pegawai pemerintah juga digambarkan demikian.

4. Pengendalian Konflik

Pengendalian konflik atau sering disebut peraturan pertentangan oleh Dahrendorf dianggap sebagai upaya pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang sedang dipertentangkan. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh institusi-institusi yang berwenang untuk mengadili permasalahan yang sedang terjadi. Langkah ini diambil agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara damai dan menurunkan kekerasan yang timbul selama konflik berlangsung. Dahrendorf mengemukakan tiga bentuk pengendalian pertentangan yaitu, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. Dalam novel *Si Anak Badai* bentuk pengendalian konflik hanya melalui arbitrase.

Arbitrase menjadi jalan dalam menyelesaikan konflik diluar proses hukum. Dalam hal ini, konflik diselesaikan melewati peran pihak ketiga (bersifat netral) yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Pihak ketiga melakukan pengambilan keputusan dengan sebijak mungkin, agar konflik terselesaikan dengan damai. Pihak yang berkonflik juga harus bersedia menerima keputusan akhir tersebut. Hal itu

bertujuan agar permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan. Adapun contoh pengendalian konflik melalui arbitrase yang terdapat pada data berikut;

Data (13)

“Kau juga ikut ke rumah Wak Sidik, Za, jadi saksi.” Bang Kopli berseru kepadaku. Berikutnya dia memberitahu Kak Ros untuk hal serupa. Juga kepada Awang. “Kau ikut aku, Awang. Kau yang menangkapnya,” katanya.

Lima belas menit kemudian urusan itu selesai. Kak Ros dan kami minta maaf kepada Unan. Beruntung, pemuda itu tidak memperpanjang urusan. Wak Sidik menyuruh Bang Kpli menyiapkan perahu kano milik Unan di dermaga (SAB, 2021: 183-186). PK/A/13

Data di atas, terdapat pengendalian konflik melalui arbitrase yang dilakukan oleh Wak Sidik. Permasalahan tersebut timbul akibat adanya kesalahpahaman antara Kak Ros dan Unan sebagai terduga pencuri. Saat Kak Ros berbelanja di pasar terapung dirinya kehilangan tas, lalu dirinya menuduh Unan sebagai pencuri. Unan yang berhasil ditangkap oleh Bang Kopli, Zaenal, dan Awang kemudian di bawah ke rumah Wak Sidik selaku kepala kampung. Wak Sidik tidak langsung mengadili Unan, dirinya melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu atas kronologi yang terjadi, di tengah proses tersebut datang seorang ibu-ibu yang membawa tas Kak Ros. Ternyata tas tersebut tertinggal di perahu. Akhirnya Wak Sidik memutuskan untuk membebaskan Unan karena terbukti tidak bersalah. Wak Sidik meminta, sebelum menuduh lebih baik memastikan banyak hal terlebih dahulu.

Dapat disimpulkan, dari data (13) arbitrase ditempuh untuk menyelesaikan konflik hilangnya tas Kak Ros. Peran pihak ketiga dipegang oleh Wak Sidik. Dia yang memberikan keputusan terakhir atas persoalan pencurian tas yang dialami Kak Ros. Wak Sidik juga bersikap netral kepada Kak Ros dan Unan. Meskipun Unan warga kampung sebelah dirinya tidak langsung diadili, sebaliknya meskipun Kak Ros warga asli Kampung Manowa dirinya tidak langsung membela selaku kepala kampung setempat. Wak Sidik melakukan penyelidikan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi. Hal itu dilakukan dengan cara menanyai para saksi seperti Zaenal dan Awang yang turut terlibat menangkap Unan. Ternyata setelah diselidiki, Unan terbukti tidak bersalah, itu hanya sebuah kesalah pahaman.

Sebagai arbitrator Wak Sidik memutuskan untuk membebaskan Unan sebagai terduga pencuri.

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat beberapa simpulan, sebagai berikut;

Dua wajah masyarakat (konflik dan konsensus). Bentuk konflik yang ada dalam penelitian ini terdapat beberapa, namun yang dituliskan berupa bentuk penindasan dan perusakan,. Adapun konsensus yang dituliskan berupa, terjadinya konsensus secara tersirat saat proses perundingan dalam menyelesaikan kasus pencurian tas Kak Ros. Serta, saat pembagian tugas pembangunan jembatan.

Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan di sini tersampaikan secara tersurat maupun tersirat. Akan tetapi yang dituliskan yaitu bentuk kekuasaan secara tersurat. Kekuasaan tersebut ditunjukkan melalui Camat Tiong yang merasa kekuasaannya berada di bawah Utusan Gubernur, dan bapak yang merasa jika kekuasaan pemerintah tidak sebanding dengan posisi dirinya. Adapun wewenang yang dipegang oleh aparat petugas dan KPK.

Kelompok yang terlibat konflik. Terdapat dua kategori kelompok bertentangan yang terdapat dalam novel *Si Anak Badai*, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Pada novel *Si Anak Badai* kelompok semu yang ditemukan berupa demonstran. Demonstran tergolong kelompok semu sebab memiliki kepentingan tersembunyi serta bersifat sementara. Selain itu, terdapat kelompok semu berupa saksi. Saksi tersebut terkategori dalam kelompok semu karena dikumpulkan oleh pejabat pemerintah secara rahasia, dan mereka memiliki kepentingan secara tersembunyi. Adapun kelompok kepentingan berupa perkumpulan masyarakat di dermaga. Mereka berkumpul karena memiliki kepentingan yang jelas untuk menentang proyek pembangunan pelabuhan. Selain itu, terdapat Pak Alex, Camat Tiong, serta Utusan Gubernur yang mengadakan pertemuan guna membahas kepentingan pembangunan pelabuhan.

Pengendalian konflik. Bentuk pengendalian konflik dalam novel *Si Anak Badai* yaitu arbitrase. Bentuk arbitrase yang terdapat dalam novel karya Tere Liye ini ditunjukkan melalui tindakan Bang Kopli yang memutuskan menyerahkan kasus pencurian tas Kak Ros kepada Wak Sidik selaku kepala kampung. Posisi Wak Sidik demikian mendorong dirinya dalam mencari jalan paling bijak

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Wak Sidik tidak langsung menghakimi pelaku, namun mendalami kronologinya terlebih dahulu. Ternyata kejadian yang dialami Kak Ros murni sebuah kesalahan paham. Wak Sidik meminta agar mereka yang telah menduga si pencuri untuk meminta maaf,. Akhirnya permasalahan terselesaikan secara damai.

2. Saran

a. Saran Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya kajian sastra anak terutama tentang teori konflik Ralf Dahrendorf.

b. Saran Praktis

Bagi penulis, dalam melakukan penelitian ini masih banyak melakukan kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan memperoleh masukan-masukan dari ahli bidang terkait agar dapat dijadikan pembelajaran di masa depan.

Bagi mahasiswa, khususnya Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat mengembangkan penelitian mengenai konflik sosial ini lebih lanjut menggunakan objek yang berbeda, khususnya sastra anak. Selain itu, bagi mahasiswa yang akan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk pengkajian sastra, diharapkan lebih mendalami teori tersebut, mencari berbagai literatur, dan menganalisis dengan cermat agar menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Bagi peneliti selanjutnya, novel *Si Anak Badai* karya Tere Liye dapat dianalisis dengan fokus kritik sosial teori Gillin dan Gillin. Teori Gillin dan Gillin mengategorikan kritik sosial menjadi 9 bagian yaitu, politik, ekonomi, pendidikan, keluarga, moral, gender, kebiasaan, agama, dan teknologi. Oleh karena novel ini sebagian besar menceritakan mengenai bentuk tindakan pejabat pemerintah terhadap masyarakat biasa, maka peneliti menyarankan agar dikaji utamanya mengenai kritik politik saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Habib. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. IAIN Mataram.
- Damayanti, Atika., & Resdianto Permata Raharjo. (2022). *Pengaruh Konflik Eksternal Terhadap Kejiwaan Tokoh Sumiko dalam Novel Freeter Membeli*

Rumah Karya Ariwaka Hiro. Basastra,
10 (2).

Dahrendorf, Ralf. (1986). Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis-Kritik. Jakarta: Rajawali Pers.

Dahrendorf, Ralf. (1959). Class and Class Conflict in Industrial Society. California: Stanford University Press.

Dahrendorf, Ralf. (1958). Theory of Social Conflict. The Journal of Conflict Resolution, 2 (2).

Latifah, dkk. (2021). Pengantar Sastra Anak. Jakarta: Universitas Trilogi.

Liye, Tere. (2021). Si Anak Badai. Bandung: PT Gramedia.

Ritzer, George., & Douglas J. Goodman. (2012). Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ritzer, George. (1992). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Grafindo Persada.

Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.

Suyatno. (2020). Interseksi dan Bahasa Sastra Karya Anak. Surabaya: CV Prima Abadi Jaya.

Suyatno. (2009). Struktur Narasi Novel Karya Anak. Surabaya: PT Temperina Media Grafika.